

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil mengenai Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dimaknai ketika tingkat Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah daerah dari pendapatan pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah serta dari pendapatan yang lain sebagai penunjang otonomi daerah dalam asas desentralisasi.

Dalam kaitannya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan yang negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dampak yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah yaitu negatif sehingga dengan adanya kenaikan yang dialami oleh Pendapatan Asli Daerah tidak akan berakibat pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adel Rivianto dan kawan-kawan, yang menguji tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sumatera Barat.¹¹⁶

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Eka Marisca Harliyani dan Haryadi dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa rasio Keefektifan dan Keefisienan Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹¹⁷

Penelitian ini berbanding terbalik dengan teori federalisme fiskal dimana menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintahan menurut teori federalisme fiskal adalah sebuah struktur dari tingkatan pemerintah yang masing-masing mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai tanggung jawab. Federalisme fiskal sendiri merupakan sebuah perangkat prinsip pedoman yang diterapkan di sebuah negara ataupun daerah untuk merancang keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah.¹¹⁸

Maka tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur berdasar pada alasan menurut

¹¹⁶Adel Riviando.Dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum..., Vol.1 No.1,2019

¹¹⁷Eka Marisca Harliyani dan Haryadi, Pengaruh Kinerja Keuangan...,Vol.3 No.3, 2016.

¹¹⁸Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi..., Vol.4 No.2, 2021, hlm. 398-399

penelitian Gege dan Budiarsih menjelaskan bahwa ketika pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berarti pemerintah daerah kurang bijak dalam alokasi rasio pendapatan asli daerah dalam kepentingan publik.¹¹⁹ Sejalan dengan itu, penelitian Adel Riviando,dkk menyebutkan tidak berpengaruhnya pendapatan asli daerah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terindikasi bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dalam membangun masyarakat daerahnya.¹²⁰

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah yang tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari pengelolaan kekayaan sumber daya ekonomi maupun potensi ekonomi yang dimiliki daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah, Pengelolaan pendapatan asli daerah bergantung pada setiap kebijakan dari masing-masing daerah melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah.¹²¹ Mengacu pada hal ini berkesimpulan bahwa jika kurang digali dan dikelolanya potensi Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah dan alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang digunakan dalam sumber penerimaan untuk membiayai belanja modal guna sarana dan prasarana publik seperti sarana penunjang kesehatan,

¹¹⁹ Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi,...” hlm.2065

¹²⁰ Adel Riviando, Dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum... hlm.13

¹²¹ Bintang Marseno dan Erly Mulyani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vo.2 No.4, 2020, hlm. 3453

pendidikan, dan infrastruktur menyebabkan kurang efektifnya Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Timur.

Kemudian berdasarkan data, Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan wilayah yang cukup luas tentu Pendapatan Asli Daerah yang diterimapun nominalnya berbeda-beda antar daerah, pada kenyataannya perolehan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun pada setiap kabupaten/kota cenderung fluktuatif dan mengakibatkan disparitas antar daerah. Hal ini perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah untuk alokasi publik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir disparitas antar daerah.

Selain itu terdapat kendala yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.¹²² Tinggi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain belum berperan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.

¹²²Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm. 19-20

B. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil mengenai Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dimaknai ketika tingkat Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan dana transfer oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka perwujudan Desentralisasi dengan harapan tidak adanya ketimpangan antar daerah. Pembagian Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Dalam kaitannya Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan yang negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dampak yang diberikan oleh Dana Perimbangan yaitu negatif sehingga dengan adanya kenaikan yang dialami oleh Dana Perimbangan tidak akan berakibat pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan

yang bertujuan mengurangi ketimpangan pada Provinsi Jawa Tengah belum berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.¹²³

Selain itu penelitian Febita Agustin Nurhalimah, Dkk dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Kota Surabaya”, menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹²⁴

Penelitian ini berbanding terbalik dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa hubungan antara *principal* dan agen yang berdasar dan bertindak atas nama bersama serta berguna bagi kepentingan *principal* dan atas tindakannya agen mendapatkan imbalan tertentu.¹²⁵. Dalam kaitannya dengan Dana Perimbangan melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh pemerintah pusat (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-

¹²³Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan ...”, Vol.1 No.1, 2018

¹²⁴Febita Agustin Nurhalimah.DKK, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan..., Vol. 10 No.2, 2021.

¹²⁵Nabiyatun Nur Fatimah,Dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan...”,Vol..22 No.2,2019, hlm. 199

hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.¹²⁶

Dana Perimbangan memiliki kecenderungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur dengan alasan Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Hastu dan Zulfikar menyebutkan Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat besar, tetapi pengalokasian Dana Perimbangan sendiri pada suatu daerah tidak selalu difokuskan untuk pembangunan manusianya, melainkan juga alokasi kualitas perekonomian daerah dan untuk belanja pegawai.¹²⁷ Hal ini menunjukkan berkemungkinan suatu Dana Perimbangan kurang dialokasikan dalam belanja pembangunan sebagai fasilitas kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Ni Luh menjelaskan bahwa Pengalokasian belanja seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien untuk pemaksimalan mutu pemberian jasa kepada masyarakat. Alokasi belanja sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang berdampak jangka panjang, seperti membangun sarana dan prasana yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aset tetap.¹²⁸

Selain itu menurut penelitian Anim dan Imanda menyebutkan bahwa Dana perimbangan juga digunakan untuk alokasi khusus seperti investasi

¹²⁶Hastu Askoro dan Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap...", Vol.1 No.1, 2016. Hlm. 55

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 62

¹²⁸Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia", *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15 No.3, 2016, hlm. 2415

yang berpengaruh dalam jangka panjang seperti peminimalan ketidakmerataan infrastruktur.¹²⁹ Namun pembangunan manusia pada suatu daerah tidak dapat dijelaskan melalui segi kuantitas fisik maupun bangunan namun juga harus dari segi kualitas hidup manusianya.¹³⁰

Hal ini dapat disimpulkan ketika kurangnya alokasi Dana Perimbangan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal guna pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum serta lingkungannya menyebabkan Dana Perimbangan yang digunakan oleh pemerintah daerah belum dapat berperan secara signifikan terhadap kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan itu, pada dasarnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan tercermin dari teori keagenan. Di mana dalam hal ini pemerintah pusat berupaya dalam mengatasi disparitas antar daerah dengan penyaluran dana untuk membantu pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun dalam konteks ini, tidak adanya hubungan yang korelatif antara Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur, disebabkan karena Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dialokasikan pada hal yang berbeda-beda. Hal ini mengacu bahwa Dana Perimbangan dibagi menjadi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.

¹²⁹Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan ...", Vol.1 No.1, 2018, hlm 58

¹³⁰Hastu Askoro dan Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap...", Vol.1 No.1, 2016. Hlm. 62

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah meratakan kemampuan keuangan antar daerah dengan formula penerapan yang dipertimbangkan dari potensi daerah, kebutuhan fiskal dan kebutuhan belanja pegawai. Kemudian Dana Bagi Hasil merupakan sumber dana dari APBN yang dibagi kepada pemerintah daerah dengan ketentuan berdasar pada angka presentase tertentu yang telah diatur dengan mempertimbangkan potensi daerah.¹³¹ Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN, dengan pengalokasian kepada pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan khusus dengan mempertimbangkan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.¹³²

Ketiga alokasi Dana Perimbangan ini tentu memiliki kontribusi pada daerah yang berbeda-beda. Dana alokasi umum hanya digunakan dalam memenuhi anggaran pemerintah daerah, yang mana alokasinya banyak digunakan guna anggaran belanja pegawai dan bukan belanja modal. Sedangkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika adanya besaran anggaran belanja modal daerah. Kemudian penggunaan dana bagi hasil merupakan wewenang dari pemerintah daerah, namun terdapat beberapa komponen yang persentasenya ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kurang leluasa dalam pengelolaan dana bagi hasil yang akan digunakan sebagai pelayanan kesejahteraan

¹³¹ Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap...", hlm. 2

¹³² Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli ..., hlm. 47

masyarakat. Sedangkan pengalokasian Dana alokasi khusus di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Terdapat perbedaan dana alokasi khusus pada setiap kabupaten/kota sehingga setiap daerah memiliki prioritas pembangunan pada skala yang berbeda yang berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan tidak diketahuinya secara rinci sarana atau prasarana apa saja yang telah dibangun oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dengan alasan tersebut Dana Perimbangan tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.

C. Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil mengenai Pengeluaran Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Hubungan positif dapat dimaknai ketika tingkat Pengeluaran Perkapita meningkat maka akan meningkatkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran Perkapita disini dimaknai dengan pola pembiayaan yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam suatu periode, atau lebih tepatnya disebut dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu pengeluaran dimana dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup rumah tangga dalam suatu periode.

Dalam kaitannya Pengeluaran Perkapita yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan yang signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia, dampak yang diberikan oleh Pengeluaran Perkapita yaitu positif sehingga dengan adanya kenaikan yang dialami oleh Pengeluaran Perkapita akan berakibat baik pada meningkatnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah Permana, Dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016” menyatakan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹³³

Selain itu penelitian oleh Siska Damayanti yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Provinsi, Dan Rasio Ketergantungan Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia”, menyatakan dalam penelitian bahwa didalam rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹³⁴

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Keynes mengenai Teori Konsumsi yang menyatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat.¹³⁵ Keynes dalam penelitiannya telah melakukan perbandingan antara tingkat pendapatan tertentu dan pengeluaran konsumsi dengan

¹³³Apriansyah Permana, dkk, Pengaruh Pengeluaran Per Kapita..., Vol. 20.No.1, 2019.

¹³⁴Siska Damayanti, Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Provinsi, Dan ..., *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2018

¹³⁵Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*,...hlm 160

kecondongan konsumsi. Ketika kecondongan seseorang untuk mengkonsumsi tinggi, maka pendapatan akan dihabiskan untuk konsumsi, jika kecondongan mengonsumsi seseorang rendah, maka akan sedikit pendapatan masyarakat yang akan belanjakan untuk konsumsi.¹³⁶

Namun pada dasarnya tingkat pendapatan yang tinggi disini tidak terlepas dari imbangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang berarti masyarakat mendapatkan penghasilan guna pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.¹³⁷ Selain itu faktor demografi Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dapat memberbesar adanya pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pada setiap rata-rata perkeluarga atau per orang memiliki pengeluaran yang rendah.¹³⁸

Sejalan dengan teori Keynes, menurut penelitian yang dilakukan Nyoman Lilya dan I Ketut yang menyatakan bahwa ketika kemampuan daya beli masyarakat akan mendorong permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga hal tersebut dapat pula memicu pertumbuhan ekonomi terkait konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakat tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya terkait pemenuhan kebutuhan.¹³⁹

¹³⁶Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, ...hlm. 86

¹³⁷ Nabelah Farrasy Jannaty, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap, ... Vol.1 No.2,2018, hlm. 231

¹³⁸ Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*,...hlm. 158

¹³⁹ Nyoman Lilya S.D dan I Ketut.S, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia...hlm. 112

Kemudian Menurut Asmawani dan Eddy dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan yang positif dan korelatif antara Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia terjadi karena Pengeluaran Perkapita merupakan bentuk ukur dari standar kehidupan yang layak bagi manusia dan tercermin pada tingkat daya beli yang ada. Daya beli masyarakat yang cenderung tinggi menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menunjukkan pembangunan manusia yang baik.¹⁴⁰

Maka dapat disimpulkan bahwasanya ketika Pengeluaran Perkapita Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan akan berakibat pada kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia dengan alasan Pengeluaran Perkapita merupakan gambaran standar hidup layak yang mana didalamnya terdapat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat karena dampak membaiknya suatu ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dapat dilihat dari besarnya rata-rata konsumsi perkapita sebagai wujud pencapaian pembangunan standar kelayakan hidup. Kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah akan meningkat apabila konsumsi perkapita masyarakat mengalami kenaikan. Maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran perkapita adalah ukuran standar kelayakan hidup yang mana dengan tingginya pengeluaran perkapita dapat tercapainya hal pokok penunjang kehidupan manusia.

¹⁴⁰ Asmawani dan Drs.Eddy.P, “ Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Sains Ekonomi*, Vol.2 No.1, 2020, hlm.107

Tercapainya hal ini mengakibatkan Pengeluaran perkapita dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Timur.

D. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan Uji F, diperoleh hasil mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita bersama sama berpengaruh positif signifikan atau Simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. Artinya ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita secara bersama sama mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap naiknya tingkat Indeks Pembangunan Manusiannya, begitupun ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita secara bersama sama mengalami penurunan maka akan berpengaruh pada turunnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan nilai koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,858 atau 85,8% menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Perkapita dalam menerangkan variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,8% sedangkan sisanya 14,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Hal ini terbukti dengan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliana Dan Heru Satria Rukmana dengan judul “Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016”. Hasil penelitian dengan pada pengujian uji F diperoleh bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK secara simultan mempunyai berpengaruh signifikan terhadap IPM.¹⁴¹

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan A. Jauhar Mahya dan Widiowati, dengan judul “Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Dengan hasil penelitian numerik menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Perkapita secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹⁴²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang lain guna pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian Dana Perimbangan sendiri merupakan dana pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna pembiayaan keperluan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi serta pendapatan yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah. Untuk Pengeluaran Perkapita merupakan himpunan dari biaya yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga dalam

¹⁴¹Juliana dan Heru Satria Rukmana, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan..., Vol.2 No.1, 2020

¹⁴²A. Jauhar Mahya dan Widowati, “Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah..., Vol.3 No.2, 2021

periode tertentu. Selanjutnya, suatu pengeluaran perkapita mendefinisikan penggunaan pendapatan yang diterima dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kaitan tersebut tentunya secara bersama-sama ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada naiknya tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Timur.

Secara teoritis, masing-masing variabel Independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Perkapita secara parsial memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana teori yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan melalui teori federalisme fiskal dimana menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur pemerintahan yang digunakan berlapis, masing-masing dengan sumber pendapatan dan tanggung jawab.¹⁴³ Kemudian hubungan Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan dengan teori keagenan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen bertindak atas nama umum, melayani kepentingan prinsipal, dan agen menerima imbalan tertentu atas tindakannya.¹⁴⁴ Pencerminan teori ini dilihat mengenai dana perimbangan yang memiliki hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan

¹⁴³ Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah...hlm 398

¹⁴⁴ Nabiyatun Nur Fatimah, Dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan...hlm 199

pemerintah daerah (agen) dalam penyaluran dana perimbangan, dan hubungan antara kewenangan DPRD (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Karena itu, akibat pendelegasian kewenangan, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk membantu pemerintah daerah mendanai kebutuhan sehari-hari mereka dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat mereka.¹⁴⁵

Selanjutnya implementasi hubungan Pengeluaran Perkapita dilihat dari teori konsumsi Keynes, yang menyatakan bahwa tingkat pengeluaran konsumen hanya didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat.¹⁴⁶ Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Lilya dan I Ketut yang menyatakan bahwa ketika kemampuan daya beli masyarakat akan mendorong permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga hal tersebut dapat pula memicu pertumbuhan ekonomi terkait konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakat tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya terkait pemenuhan kebutuhan.¹⁴⁷ Ketika masing-masing teori tersebut telah menyatakan bahwa secara parsial saja Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan dan Pengeluaran Perkapita memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka sejatinya secara bersama-sama kontribusi ketiga hal tersebut akan semakin besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

¹⁴⁵ Hastu Askoro dan Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus ... hlm. 55

¹⁴⁶ Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. hlm. 160

¹⁴⁷ Nyoman Lilya S.D dan I Ketut.S, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan... hlm. 112

Semakin banyaknya sumber modal yang dimiliki oleh suatu daerah, maka pembangunan manusia yang dilakukan akan cepat terwujud. Dalam hal ini potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang digali, dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan aspek utama pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan serta sarana publik guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu pengeluaran perkapita suatu daerah menunjukkan aspek utama pembangunan manusia yaitu kelayakan standar hidup. Dimana Pengeluaran perkapita menggambarkan bahwa masyarakat pada daerah berpendapatan tinggi maka tingkat daya beli masyarakat juga akan meningkat dalam memenuhi konsumsinya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.